

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi perempuan dalam pembangunan merupakan elemen krusial dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peran perempuan dalam pembangunan seringkali terbatas pada posisi pasif, namun kini, terdapat kebijakan dan program yang telah mendorong keterlibatan mereka secara aktif. Salah satu program yang memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Program ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan perempuan.

Menurut data dari Kemenko PMK yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Woro Srihastuti Sulistyningrum, hampir separuh dari penduduk Indonesia 49,4 persen adalah perempuan (Kemenko, 2024). Artinya, perempuan menyumbang separuh potensi pembangunan negara. Oleh karena itu, memastikan perempuan memiliki kualitas, produktivitas, dan daya saing yang tinggi menjadi hal yang sangat penting. Di sektor kesehatan, kontribusi perempuan semakin terlihat nyata. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2019, sekitar 70% dari 1,2 juta tenaga medis di Indonesia adalah perempuan, dengan peran yang tersebar di berbagai profesi seperti

dokter, perawat, ahli gizi, hingga dokter spesialis anak (Kemenkes RI, 2023). Keterlibatan perempuan di Posyandu memperkuat kontribusi ini. Selain membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, Posyandu memberikan peluang besar bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan sekaligus terlibat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga penggerak utama dalam upaya membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Di dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, juga membuka peluang bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal dan perencanaan pembangunan (Monica & Fauziah, 2017). Untuk mendukung keterlibatan ini, peran anggota parlemen baik perempuan maupun laki-laki juga menjadi penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender, khususnya melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif. Dengan bekerja sama dengan eksekutif, anggota parlemen dapat memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah turut mendorong pemberdayaan perempuan serta pelibatan mereka secara nyata dalam pembangunan (Palulungan, L., Kordi K., M. G. H., & Ramli, 2020). Namun, meskipun ada kebijakan yang mendukung, implementasinya di lapangan masih memerlukan perbaikan agar perempuan dapat lebih berdaya dalam berbagai aspek pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang hingga kini belum mencapai target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pada tahun 2023, rata-rata AKI di seluruh wilayah Indonesia masih tercatat di atas 100 kematian per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan rata-rata AKB berada di atas 15 kematian per 1.000 kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik, 2023). Lebih lanjut, data tahun 2020 mencatat angka kematian balita di Indonesia mencapai 28.158 jiwa. Dari jumlah tersebut, kematian neonatal mendominasi dengan angka tertinggi yakni 20.266 jiwa (71,9%) yang terjadi pada kelompok umur 0 hingga 28 hari. Sementara itu, kematian balita pada kelompok umur 29 hari sampai 11 bulan sebanyak 5.386 jiwa (19,13%) dan kelompok umur 12 sampai 59 bulan sebesar 2.506 jiwa (8,9%) (Larasati et al., 2024).

Dalam upaya menekan angka tersebut, peran layanan kesehatan masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu bentuk layanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Jika dilihat kebermanfaatannya dari Posyandu ini tidak hanya dirasakan oleh para kader, tetapi juga oleh pengguna layanan yang sebagian besar adalah ibu dan anak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengguna layanan Posyandu merasa bahwa program ini memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup mereka, terutama dalam hal kesehatan ibu dan anak (Riani, 2019). Lebih jauh lagi, faktor fasilitas kesehatan memang tidak diragukan lagi dianggap sebagai aspek vital dalam upaya menurunkan angka kematian

ibu dan bayi. Dalam konteks ini, keberadaan Posyandu menjadi pelengkap yang sangat penting dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Posyandu berperan langsung dalam menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah, terutama dalam menangani masalah malnutrisi dan memberikan edukasi kesehatan secara berkelanjutan. Peran ini menjadi sangat krusial mengingat masalah gizi buruk dapat menimbulkan dampak serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, kekurangan gizi dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan fisik, serta metabolisme tubuh anak. Sementara itu, dalam jangka panjang, dampaknya meluas hingga menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, lemahnya sistem kekebalan tubuh yang membuat anak rentan terhadap penyakit, hingga meningkatnya risiko penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan gangguan pembuluh darah (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Perannya melengkapi fasilitas kesehatan formal yang sering kali belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil (Badan Pusat Statistik, 2023). Oleh karena itu, sinergi antara fasilitas kesehatan formal dan peran aktif Posyandu menjadi kunci dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh.

Maka dari itu, peran perempuan sebagai kader Posyandu menjadi sangat krusial. Keterlibatan aktif perempuan tidak hanya menguntungkan mereka secara individu, tetapi juga berdampak luas bagi pembangunan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap peran ini semakin

kuat dengan tumbuhnya organisasi perempuan, meningkatnya kesetaraan gender, dan akses pendidikan yang lebih baik, yang mendorong perempuan untuk lebih percaya diri, mandiri, serta aktif berorganisasi guna mengembangkan keterampilan, wawasan, dan kondisi ekonomi keluarga. Perempuan pun mampu mengaktualisasi diri tanpa meninggalkan peran utamanya dalam keluarga (Rapitasari & Pribadiyono Suwitho, 2020). Hal ini menjadi semakin relevan mengingat data sensus dan proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi masyarakat. Pada 2010, proporsinya adalah 50,1% laki-laki dan 49,9% perempuan. Namun, proyeksi tahun 2025 menunjukkan perempuan sedikit lebih banyak, yaitu 50,1% dibandingkan laki-laki 49,9% (Hayati & Supartiningsih, 2013). Dengan memberdayakan perempuan melalui kegiatan seperti Posyandu, masyarakat memperoleh manfaat ganda yaitu peningkatan kualitas kesehatan serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji secara mendalam penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui Posyandu Posko Pelayanan 2 (selanjutnya dalam skripsi ini disebut PP 2) RW 10 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui Posyandu, tetapi juga

menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan kajian keilmuan tentang masyarakat (*civic community*) di Program Studi PPKn.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah utama dalam penelitian ini adalah strategi penguatan partisipasi perempuan melalui Posyandu PP 2 RW 10, Utan Kayu Utara, dalam pembangunan.

C. Fokus dan SubFokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah pada partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui Posyandu PP 2 RW 10, Utan Kayu Utara.

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka Subfokus dalam penelitian ini strategi penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui Posyandu.

D. Pertanyaan Penelitian

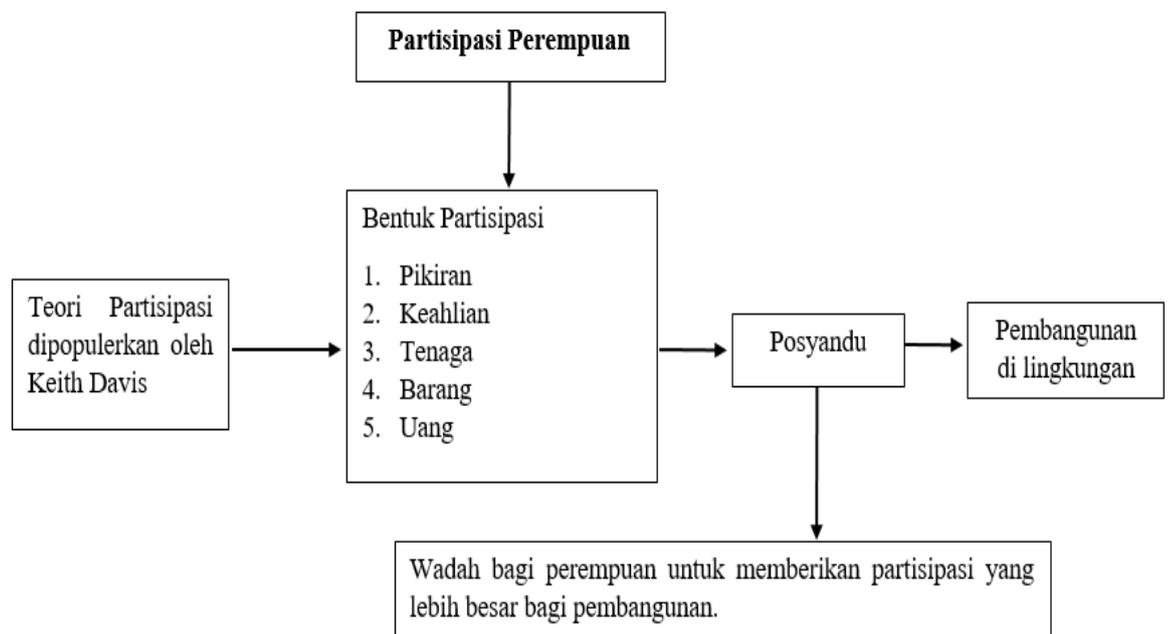
Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian yang diusung :

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam Posyandu PP 2 RW 10, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur ?
2. Bagaimana strategi penguatan partisipasi perempuan dalam Posyandu PP 2 RW 10, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur ?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui peran Posyandu sebagai tempat pemberdayaan.
2. Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis kepada beberapa pihak, yaitu :
 - a. Perempuan : memberikan gambaran tentang cara perempuan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan di lingkungan mereka yang dapat dilakukan melalui posyandu.
 - b. Pemerintah dan lembaga terkait : memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki program dan kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan melalui Posyandu.
 - c. Peneliti : memberikan pengalaman dan pengetahuan lebih mendalam tentang peran perempuan dalam pembangunan melalui Posyandu.

F. Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

